

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**CHINTIA ABADI
NPM : 2202110094**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CHINTIA ABADI
NPM : 2202110094

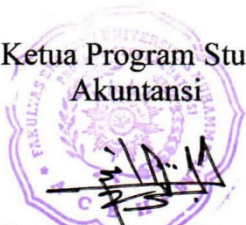
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021-2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi



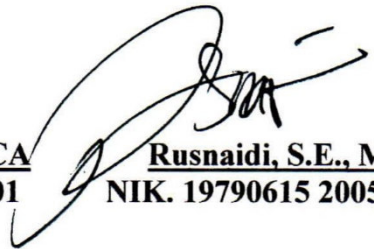
Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1001

Pembimbing I



Syamsidar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II



Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,



Drs. Tarnizi Gadeng, S.E. M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CHINTIA ABADI
NPM : 2202110094

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021-2023**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 5 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. H. Iarmizi Gadeng, S.E., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Rushaidi, S.E., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK. 19840929 200902 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Yang Menyatakan



CHINTIA ABADI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chintia Abadi
NPM : 2202110094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2021-2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 7 Agustus 2024

Banda Aceh, 7 Agustus 2024
Yang Menyatakan



CHINTIA ABADI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021-2023”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, pengarahan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya dan adikku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
2. Allah SWT. Atas segala limpahan rahmad, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pembimbing I Penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Elviza, SE., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Rusnaldi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing dua penulis yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
9. Seluruh Dosen, staf pengantar, karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
10. Kepada Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah mengizinkan melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	10
2.1.1 Kinerja	10
2.1.2 Anggaran	11
2.1.3 Kinerja Anggaran	12
2.1.4 <i>Value For Money</i>	14
2.1.5 Rasio Ekonomi	16
2.1.6 Rasio Efisiensi	17
2.1.7 Rasio Efektifitas	20
2.2 Penelitian Sebelumnya	22
2.3 Kerangka Pemikiran	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	30
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian	30
3.1.2. Jenis Penelitian.....	30
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	31
3.1.4. Horizon Waktu	31
3.1.5. Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Teknik Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh	39
4.2. Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Rasio Ekonomi Dinas Pertanian dan Perkembangan	

Aceh.....	39
4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh.....	41
4.2.3 Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh.....	42
4.3. Pembahasan	44
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	44
4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	47
4.3.3 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021-2023	6
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi	17
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	20
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas	22
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Horison Waktu Penelitian	32
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi	35
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	36
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas	36
Tabel 4.1 Hasil Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023	33
Tabel 4.2 Hasil Rasio Efisiensi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023	42
Tabel 4.3 Hasil Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023	43
Tabel 4.4 Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023	45
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dari Tahun 2021 s.d 2023	47
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkembangan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Tingkat Persentase Capaian Efektifitas Anggaran5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	57
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	60
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	64

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2021-2023**

**CHINTIA ABADI
NPM : 2202110094**

Pembimbing : 1. Syamsidar, SE, M.Si, Ak. CA
2. Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran *dengan konsep value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ditinjau dari rasio ekonomi, efisiensi dan rasio efektifitas tahun 2021-2023. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yang difokuskan rasio ekonomi, efisiensi dan efektifitas belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan belanja anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 dapat dikatakan ekonomis. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran dan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 dapat dikatakan tidak efisien. Berdasarkan rasio efektifitas bahwa realisasi anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 dan tahun 2023 dapat dikatakan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang efektif

Kata Kunci : *Pendapatan, Belanja Anggaran, Rasio Ekonomi, Efektifitas dan Efisiensi*

***ANALYSIS OF BUDGET PERFORMANCE USING THE CONCEPT OF
VALUE FOR MONEY AT THE ACEH AGRICULTURE AND PLANTING
DEPARTMENT YEAR 2021-2023***

***ETERNAL CHINTIA
NPM: 2202110094***

Supervisor: 1. Syamsidar, SE, M.Si, Ak. C.A
2. Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze budget performance using the value for money concept at the Aceh Agriculture and Plantation Service in terms of economic ratios, efficiency and effectiveness ratios for 2021-2023. The analysis model that will be used is a descriptive analysis method that focuses on economic ratios, efficiency and effectiveness of spending at the Aceh Agriculture and Plantation Service in 2021-2023. The results of the research show that based on economic ratios, the realization of budget targets and spending budget at the Aceh Agriculture and Plantation Service for 2021-2023 can be said to be economical. Based on the efficiency ratio, the realization of expenditure and realization of the income budget at the Aceh Agriculture and Plantation Service for 2021-2023 can be said to be inefficient. Based on the effectiveness ratio, the realization of the revenue and expenditure budget at the Aceh Agriculture and Plantation Service in 2021 and 2023 can be said to be ineffective. Then in 2022 it can be said to be less effective

Keywords: Revenue, Budget Expenditures, Economic Ratios, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik saat ini harus memiliki standar penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada sektor pemerintahan. Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabilitas (Chudri et al., 2023). Kinerja instansi pemerintah dapat diukur berdasarkan berbagai faktor, termasuk efisiensi pengelolaan anggaran, efektifitas dalam memberikan layanan publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap masyarakat. Evaluasi terhadap bagaimana instansi pemerintah menggunakan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan mereka. Ini mencakup penilaian terhadap pengeluaran yang sesuai dengan rencana, penghindaran pemborosan, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Kinerja anggaran merujuk pada seberapa efektif dan efisien pengelolaan dan penggunaan anggaran oleh suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Ini mencakup evaluasi atas sejauh mana anggaran telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta apakah alokasi anggaran telah dilakukan secara tepat untuk mendukung prioritas dan kebutuhan yang ada. Penting untuk memahami bahwa kinerja anggaran tidak hanya mencakup pencapaian tujuan

finansial, tetapi juga melibatkan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dan dampaknya terhadap tujuan instansi secara keseluruhan. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti efisiensi penggunaan sumber daya, efektifitas program dan kegiatan yang didanai, ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

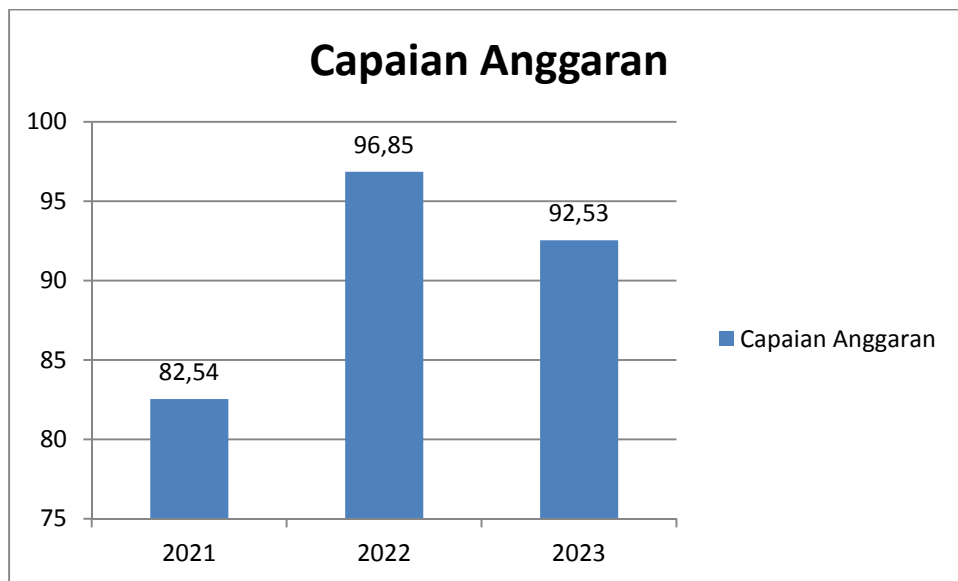
Pengukuran kinerja anggaran merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi atau entitas yang bersangkutan. Pengukuran kinerja anggaran dapat dilakukan secara berkala, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan, dan merupakan bagian integral dari proses pengelolaan anggaran yang efektif. Ini membantu entitas untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi sumber daya keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan, seperti rasio keuangan, tingkat pengeluaran, dan pengendalian biaya, untuk menilai keadaan keuangan entitas dan dampaknya terhadap tujuan instansi pemerintah.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang dapat digunakan sebagai alat manajemen organisasi untuk membantu publik dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Konsep *Value for Money* merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai dari *Output* yang dihasilkan saja, tetapi *Input*, *Output*, dan *outcome* harus dilihat secara bersama-sama. Bahkan mungkin perlu menambahkan pengukuran cakupan distribusi dan layanan (*equity and service coverage*).

Kriteria utama yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dalam pengukuran *Value for Money* adalah ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang akan dicapai dalam penerapan *Value for Money* yaitu ekonomis (hemat-cermat), efisiensi dalam penggunaan sumber daya (berdaya guna) dalam pengadaan alokasi sumber daya dan meminimalkan penggunaan sumber daya (efisien), dan hasilnya maksimal (memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya) dan efektif (efektif) dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebuah lembaga pemerintah di provinsi Aceh, Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, termasuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lainnya, serta memberikan dukungan kepada petani perkebunan dalam hal teknis dan pengembangan usaha. Membangun dan memelihara infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan pedesaan, dan fasilitas pasca panen, untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Aceh.

Salah satu alat pengendali sekaligus alat ukur untuk mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah dapat menggunakan skema alat ukur yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan memfokuskan pada prinsip *Value For Money* (VFM), kinerja pelaksanaan anggaran yang direalisasikan ini untuk mengukur belanja pemerintah. Ringkasnya mencakup ekonomi, efisiensi dan efektifitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Berbagai macam anggaran yang terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan lainnya. Namun dari semua program anggaran tersebut, tidak ada yang mencapai target 100%. Sebagai pengamatan awal kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh peneliti menampilkan salah satu rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektifitas dengan data sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Gambar 1.1.

Tingkat Persentase Capaian Efektifitas Anggaran

Fenomena yang terjadi berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa capaian efektifitas anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami peningkatan dan penurunan atau berfluktuasi. Pada tahun 2021 dengan capaian efektifitas anggaran sebesar 82,54%, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,85%, namun pada tahun 2023 capaian efektifitas anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami penurunan sebesar 92,53% sehingga hal ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi mengenai kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Permasalahan capaian efektifitas anggaran dapat menjadi tantangan serius bagi instansi pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengenai output (realisasi anggaran) dan *Input* (jumlah anggaran belanja) pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2021	251.446.365.029	207.541.235.615	43.905.129.414	82,54%
2022	313.514.337.825	303.637.632.997	9.876.704.828	96,85%
2023	211.413.062.859	195.613.815.205	15.799.247.654	92,53%

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi) sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp251.446.365.029, pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja sebesar Rp313.514.337.825 dan pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja sebesar Rp211.413.062.859. Sisa anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai miliaran. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) yaitu sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp43.905.129.414 dengan tingkat persentase 82,54%, sisa anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp9.876.704.828 dengan tingkat persentase 96,85%, dan sisa anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp15.799.247.654 dengan tingkat persentase 92,53%.

Hasil penelitian dari Yulianda et al. (2022) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektifitas yang baik.

Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai efektifitas yang baik. Kemudian untuk program rehabilitasi sosial untuk tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 berjalan dengan efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mencapai efisiensi dengan baik, dan tahun 2020 belum mencapai efektifitas yang baik, sedangkan pada tahun 2021 mencapai efektifitas berimbang.

Permasalahan yang sering terjadi dalam belanja barang dan jasa pemerintah adalah pola penyerapan anggaran yang sering diistilahkan sebagai “*slow back-loaded expenditure*” atau realisasi anggaran tersendat-sendat. Pola ini adalah penyerapan yang memiliki pola penyerapan anggaran belanja rendah di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun dan meningkat secara signifikan di akhir tahun. Pola rendahnya penyerapan di awal tahun cenderung menjadi permasalahan yang klasik dalam tata kelola pelaksanaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, *Value For Money* yang diwujudkan dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai salah satu alat pengendali pelaksanaan anggaran, dinilai sudah tepat untuk mengatasi pola yang berulang kali ini. Semakin cepat penyerapan maka kebermanfaatan belanja pemerintah akan semakin nyata, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul: “**Analisis Kinerja Anggaran Dengan Konsep *Value For Money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2021-2023**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio ekonomis.
- 2 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio efisiensi.
- 3 Bagaimanakah kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio efektifitas.

1.3. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio ekonomis.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio efisiensi.

- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 yang ditinjau dari rasio efektifitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh .
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi kementrian dan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh khususnya kinerja anggaran.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja anggaran

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan kinerja anggaran dengan konsep *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang merupakan kriteria utama dalam pelaksanaan manajemen publik dalam pengukuran *value for money* adalah ekonomi, efesiensi, efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan rasio yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektifitas tahun 2021-2023.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kinerja

Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Mengenai penilaian kinerja, menurut Simamora adalah proses yang mengukur karyawan, penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan. Hasibuan (2020:93) menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Menurut Winardi (2020:136) menyatakan bahwa “seorang manajer yang bekerja ekstra lama di kantornya guna memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam-jam kerja ekstra tersebut berbenturan dengan kebutuhannya akan diafiliasi yang diekspresi dalam wujud keinginannya untuk berada ditengah-tengah keluarga”.

Menurut Mangkunegara (2020:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sedarmayanti (2019:2019) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai

Formatted: Different first page header

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah.

2.1.2 Anggaran

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2020:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Menurut Mardiasmo (2020:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Menurut Suparmoko (2020:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Menurut Prawironegoro (2020:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. Menurut Anthony dan Govindarajan (2020:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

2.1.3 Kinerja Anggaran

Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005), tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka APBK. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan (Syamsidar & Jawiyah, 2015). Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya

diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Halim (2020:20) APBK adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Halim (2020: 24), kinerja anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah

Keuangan daerah menurut Halim (2020:23) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran

merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2.1.4 Value For Money

Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2019:57), *value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2020:128) *value for money* adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Melalui *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Menurut Mahmudi (2019:98) *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *Output*, karena *Output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *Output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible Output*. Menurut Mahmudi (2019:83), menyatakan bahwa *Value for money* merupakan metode yang penting dalam organisasi sektor publik yang

memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*).

Value for money merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *Input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *Input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara *Output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *Output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *Output* dengan *Input* atau istilah lain *Output per unit Input*.
3. Efektifitas: efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara *Output* dengan tujuan.

Menurut Mardiasmo (2020:128) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan *Input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *Input* dengan *Input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.
2. Efisiensi, yaitu pencapaian *Output* yang maksimum dengan *Input* tertentu atau penggunaan *Input* yang terendah untuk mencapai *Output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *Output/Input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektifitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan *Output*.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Mardiasmo (2020:127) indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *Output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Efektifitas artinya kontribusi *Output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

2.1.5 Rasio Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2020:4) ekonomi merupakan memperoleh *Input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *Input* dengan *Input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi adalah memperoleh sumber daya (*Input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *Input* dengan *Input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *Input*. Ekonomi adalah seluruh sumber daya *Input* diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut juga kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya *Input* tidak terjadi pemborosan. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.6 Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *Output* dan *Input*. Menurut Bastian (2019:59) Efisiensi adalah pencapaian *Output* yang maximum dengan *Input* tertentu

atau penggunaan *Input* yang terendah untuk mencapai *Output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *Output/Input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi biaya dengan realisasi penerimaan yang diterima (Susanti & Murnita, 2018).

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi diukur dengan rasio antara *Output* dengan *Input*. Semakin besar *Output* dibanding *Input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Mardiasmo (2020:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *Output* yang dihasilkan terhadap *Input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Menurut Halim (2020:234) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja anggaran Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja anggaran Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien, atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan

pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *Output* yang maksimum dengan *Input* tertentu atau penggunaan *Input* yang terendah untuk mencapai *Output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *Output* dengan *Input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien

4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.7 Efektifitas

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *Output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Mahmudi (2019:86) efektifitas merupakan hubungan antara *Output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *Output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *Input* dan efisiensi pada *Output* atau proses, maka efektifitas berfokus pada outcome (hasil).

Menurut Siagian (2020:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Menurut Ahadi (2020:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut.

Menurut Robbins (2019:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi

kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Mardiasmo (2020:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) merumuskan efektifitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif

5	< 60%	Tidak Efektif
---	-------	---------------

Sumber : Mahmudi (2019:85)

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *Output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *Output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Wandasari & Daulay (2023) dengan judul Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2022 baik dari segi Rasio Ekonomi dan Rasio Efisiensi, namun Rasio Efektifitas belum bisa dianggap sebagai kinerja efektif.

Karina & Ramadhani (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak mengalami fluktuasi pada periode penelitian. Rasio Ekonomis menunjukkan rata-rata 79% termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis, Rasio Efisiensi rata-rata 102% termasuk dalam kategori Tidak Efisien, sedangkan Rasio Efektifitas secara keseluruhan didapati rata-rata 97% termasuk dalam kategori Efektif.

Yulianda *et al.* (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten

Padang Lawas Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep value for money pada program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektifitas yang baik. Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai efektifitas yang baik. Kemudian untuk program rehabilitasi sosial untuk tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 berjalan dengan efisiensi, namun pada tahun 2021 belum mencapai efisiensi dengan baik, dan tahun 2020 belum mencapai efektifitas yang baik, sedangkan pada tahun 2021 mencapai efektifitas berimbang.

Penelitian dari Zenita (2022) dengan judul Analisis *Value for money* Pada Kinerja anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2020 dan 2019 dimana persentase rasio efektifitas pada tahun 2020. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektifitas diatas 100% yang artinya pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melaksanakan anggaran dengan pencapaian maksimal.

Rasyidi (2021) dengan judul Analisis *Value for money* Dalam Pengukuran Kinerja anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. Kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada	Menggunakan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara) (Wandasari & Daulay, 2023)		tahun 2022 baik dari segi Rasio Ekonomi dan Rasio Efisiensi, namun Rasio Efektifitas belum bisa dianggap sebagai kinerja efektif.		
2	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Karina & Ramadhani, 2022)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak mengalami fluktuasi pada periode penelitian. Rasio Ekonomis menunjukkan rata-rata 79% termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis, Rasio Efisiensi rata-rata 102% termasuk dalam kategori Tidak Efisien, sedangkan Rasio Efektifitas secara keseluruhan didapati rata-rata 97% termasuk dalam kategori Efektif.	Menggunakan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep value for money pada program	Menggunakan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara (Yulianda, 2022)		pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, efisiensi, dan belum mencapai dengan efektifitas yang baik. . Kemudian pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020-2021 masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2020 tergolong efisiensi berimbang, sedangkan pada tahun 2021 tergolong efisiensi, namun pada tahun 2020-2021 belum mencapai efektifitas yang baik.		
4	Analisis <i>Value for money</i> Pada Kinerja anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Zenita, 2022)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2020 dan 2019 dimana persentase rasio efektifitas pada tahun 2020. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektifitas diatas 100%.	Menggunakan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian
5	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Pengukuran Kinerja anggaran Pada Badan	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik	Menggunakan rasio ekonomi, efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

No	Judul, Nama Peneliti,(Tahun)	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Rasyidi, 2021)		perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. Berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.		

Sumber: Data diolah, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

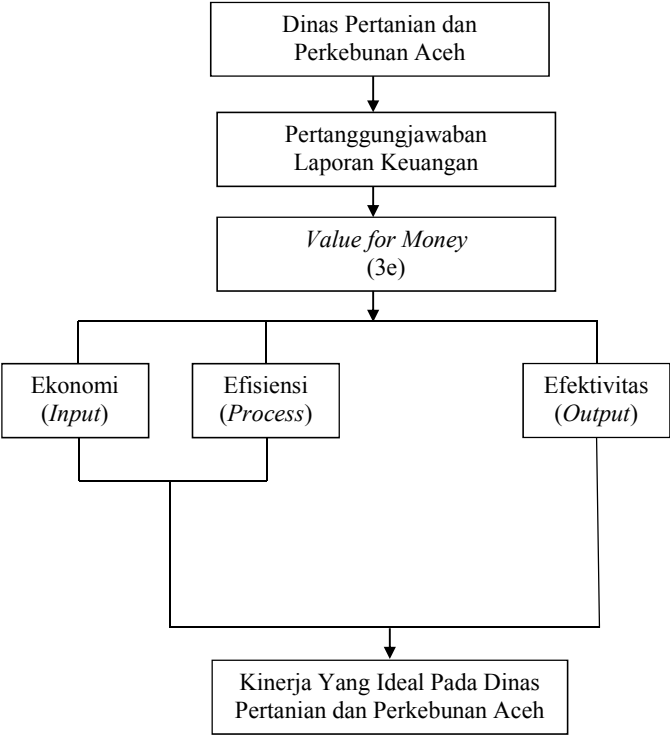
Anggaran dalam sektor publik merupakan penyelenggara pemerintah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Khaira et al., 2022). Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat tangible maupun intangible maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Value for Money*. Dalam metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (Mardiasmo, 2020:77). Analisa kinerja keuangan berdasarkan metode value for

money hanya dibatasi pada tiga rasio, yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas (- & Rinaldy, 2018).

Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (Rasyidi, 2021).

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi merupakan perbandingan *Output Input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian *Output* yang maksimum dengan *Input* yang terendah menunjukkan efisiensi
3. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah laporan realisasi anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2019:142) penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang. Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode

deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah *value for money* dalam pengukuran kinerja anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023.

3.1.4 Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2020:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.1
Horison Waktu Penelitian

Ketrangan	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
Pengajuan Judul Proposal						
Survey awal						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Penyusunan Skripsi						
Sidang						

Sumber: Data diolah, 2024

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh .

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2020:56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau

kedalaman informasi yang diperoleh”. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020:147) data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

2. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020:147) data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seperti dokumen mengenai profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh , data laporan keuangan dan lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran”

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan Mardiasmo (2020) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara *Input* dengan *Input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *Input value* adalah realisasi anggaran. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *Output* yang maksimum dengan *Input* tertentu atau penggunaan *Input* yang terendah untuk mencapai *Output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *Output* dengan *Input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

3. Rasio Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) meremuskan efektifitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:85)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh beralamat Jl. Panglima Nyak Makam No. 24, Lampineung, Kota Banda Aceh, Aceh 23125. Dinas Pertanian dan Perkebunan berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas di bidang pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan berupaya menata dan membangun pertanian dan perkebunan serta perekonomian petani di daerah Provinsi Aceh. Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki dan menyesuaikan dengan perkembangan daerah sehingga dampak pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan maksimal khususnya oleh masyarakat tani.

Adapun tugas pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;
4. Penyusunan program di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
5. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;

6. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta pembinaan;
7. Pengembangan sentra peningkatan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan; dan
9. Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu "terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani".

Sedangkan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi;

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan;

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh digunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2021} = \frac{208.560.524.903}{253.752.515.029} \times 100 = 82,19\%$$

- b. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2022} = \frac{304.247.323.168}{314.507.337.825} \times 100 = 96,74\%$$

- c. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2023} = \frac{196.014.238.994}{212.313.160.979} \times 100 = 92,32\%$$

Dari perhitungan rumus rasio ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Target anggaran belanja (Rp)	Realisasi anggaran belanja (RP)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4:3 x 100
2	2021	253.752.515.029	208.560.524.903	82,19%
3	2022	314.507.337.825	304.247.323.168	96,74%
4	2023	212.313.160.979	196.014.238.994	92,32%

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 253.752.515.029 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 82,19%. Kemudian pada tahun 2022 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 314.507.337.825 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 96,74% dan pada 2023 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 212.313.160.979 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 92,32%.

4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Belanja rutin yang digunakan dalam penelitian ini pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu program pelayanan administrasi perkantoran karena hal ini merupakan salah satu belanja rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh setiap tahunnya uang merupakan kebutuhan pegawai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja program pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Perhitungan efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2021} = \frac{208.560.524.903}{1.019.289.288} \times 100 = 20.461,37\%$$

- b. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2022} = \frac{304.247.323.168}{609.599.170} \times 100 = 49.909,41\%$$

- c. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2023} = \frac{196.014.238.994}{400.423.788} \times 100 = 48.951,70\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Rasio Efisiensi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari
Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Realisasi anggaran pendapatan (Rp)	Realisasi anggaran belanja (RP)	Persentase
1	2	3	4	$5 = 4:3 \times 100$
2	2021	1.019.289.288	208.560.524.903	20.461,37%
3	2022	609.599.170	304.247.323.168	49.909,41%
4	2023	400.423.788	196.014.238.994	48.951,70%

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.1.019.289.288 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 20.461,37%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 609.599.170 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 49.909,41%. Pada 2023 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 400.423.788 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 48.951,70%.

4.2.3 Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Rasio efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rasio ini dapat mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kinerja dan hasil yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan efektifitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021

$$\text{Rasio Efektifitas tahun 2021} = \frac{1.019.289.288}{2.306.150.000} \times 100 = 44,20\%$$

- b. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022

$$\text{Rasio Efektifitas tahun 2022} = \frac{609.599.170}{993.000.000} \times 100 = 61,39\%$$

- c. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023

$$\text{Rasio Efektifitas tahun 2023} = \frac{400.423.788}{900.098.120} \times 100 = 44,49\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Target Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Sisa Anggaran Pendapatan	Persentase (%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = (4:3) x 100
2	2021	2.306.150.000	1.019.289.288	1.286.860.712	44,20%
3	2022	993.000.000	609.599.170	383.400.830	61,39%
4	2023	900.098.120	400.423.788	499.674.332	44,49%

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa. pada tahun 2021 target anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.2.306.150.000 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 1.019.289.288 dengan tingkat persentase 44,20% dari target anggaran pendapatan, pada tahun 2022 target anggaran

pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebanyak Rp.993.000.000 dan realisasi anggaran pendapatan sebanyak Rp 609.599.170 dengan tingkat persentase 61,39% dari target anggaran pendapatan dan tahun 2023 target anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 900.098.120 dan realisasi anggaran pendapatan sebanyak Rp 400.423.788 dengan tingkat persentase sebanyak 44,49% dari target anggaran pendapatan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Analisis dan pembahasan rasio ekonomi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melibatkan penilaian terhadap beberapa aspek penting yang mencerminkan kinerja ekonomi dinas tersebut. Rasio ekonomi ini bisa meliputi efektifitas penggunaan anggaran, efisiensi operasional, dan dampak ekonomi dari program-program yang dilaksanakan. Dampak ekonomi yang positif menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan utama dinas tersebut, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran
Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	$5 = 4:3 \times 100$	5

2	2021	253.752.515.029	208.560.524.903	82,19%	Cukup Ekonomis
3	2022	314.507.337.825	304.247.323.168	96,74%	Ekonomis
4	2023	212.313.160.979	196.014.238.994	92,32%	Ekonomis

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 253.752.515.029 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.208.560.524.903 dengan tingkat persentasi 82,19%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan cukup ekonomis karena tingkat persentase antara 80% sampai dengan 90%. Rasio ekonomi yang cukup ekonomis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang mendukung efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Dengan terus menerapkan praktik terbaik dan berinovasi dalam berbagai aspek operasional, dinas dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat petani dan perkebunan di Aceh.

Pada tahun 2022 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 314.507.337.825 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.304.247.323.168 dengan tingkat persentasi 96,74%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. Penerimaan anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti pemerintah pusat atau daerah meningkatkan prioritas pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian

dari kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan petani. Kemudian peningkatan pendapatan daerah dari pajak, retribusi, atau sumber lainnya dapat memberikan lebih banyak ruang untuk alokasi anggaran yang lebih besar ke berbagai dinas, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan. eluncuran program baru atau perluasan inisiatif yang sudah ada untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti subsidi pupuk, bantuan teknis, dan pengembangan infrastruktur pertanian, membutuhkan tambahan anggaran.

Pada 2023 target anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 212.313.160.979 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 92,32%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. Penerimaan anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti pengurangan alokasi dari pemerintah pusat/daerah, pemerintah pusat atau daerah telah mengurangi alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran keseluruhan atau karena adanya prioritas yang berbeda. Kemudian pendapatan daerah yang menurun, misalnya dari pajak atau retribusi, bisa menyebabkan pengurangan anggaran untuk berbagai dinas, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selain itu, adanya penghematan dan efisiensi anggaran, Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi anggaran bisa berdampak pada pengurangan anggaran untuk berbagai program dan dinas, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan.

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Analisis dan pembahasan rasio efisiensi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melibatkan penilaian terhadap bagaimana dinas ini menggunakan sumber daya (seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu) untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi diukur dengan melihat perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	$5 = 4 : 3 \times 100$	6
2	2021	1.019.289.288	208.560.524.903	20.461,37%	Tidak efisien
3	2022	609.599.170	304.247.323.168	49.909,41%	Tidak efisien
4	2023	400.423.788	196.014.238.994	48.951,70%	Tidak efisien

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 1.019.289.288 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 208.560.524.903 dengan tingkat persentase 20.461,37%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di atas 100%. Pada 2023 realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.400.423.788

dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 196.014.238.994 dengan tingkat persentasi 48.951,70%. Artinya kemampuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di atas 100%

Ketidakefisienan pengelolaan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidak efisienan pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien.

4.3.3 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektifitas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Perkembangan pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 meningkat sebesar 14,86% dan pada tahun 2023 jumlah pendapatan sebesar 11,26%. Kemudian perkembangan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 meningkat sebesar 17,53% dan tahun 2023 realisasi anggaran pendapatan menurun sebesar 25,43%. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuangan
----	-------	------------------------	---------------------------	--------------	------------	--------------------

1	2	3	4	5 = 2-3	6= (3:2) x 100	7
2	2021	2.306.150.000	1.019.289.288	1.286.860.712	44,20%	Tidak Efektif
3	2022	993.000.000	609.599.170	383.400.830	61,39%	Kurang Efektif
4	2023	900.098.120	400.423.788	499.674.332	44,49%	Tidak Efektif

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 sampai 2023 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 1.019.289.288 dari anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 2.306.150.000 dengan tingkat persentase 44,20%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp.1.286.860.712 yang tidak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan realisasi anggaran pendapatan tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2022 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp.609.599.170 dari total anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 993.000.000 dengan tingkat persentase 61,39%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 383.400.830 yang tidak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan realisasi anggaran pendapatan tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dikatakan kurang efektif.

Pada tahun 2023 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 400.423.788 dari total anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp 900.098.120 dengan tingkat persentase 44,49%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp.499.674.332 yang tidak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dapat disimpulkan realisasi

anggaran pendapatan tahun 2023 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dikatakan tidak efektif.

Penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tidak efektif karena beberapa alasan seperti perencanaan yang tidak matang atau kurang detail dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak tepat dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Kemudian kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan proyek dapat menyebabkan penyimpangan anggaran, pemborosan, dan hasil yang tidak sesuai dengan target. Selain itu keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan melaksanakan program dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak optimal.

Penggunaan teknologi yang tidak tepat atau kurangnya pelatihan dan dukungan teknis dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dan operasional program. Tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan seperti program yang dirancang tidak berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan anggaran tidak tepat sasaran. Ketidakjelasan dalam menentukan prioritas program dan proyek dapat menyebabkan alokasi anggaran tersebar dan tidak fokus, sehingga mengurangi dampak yang diharapkan. Keterlambatan dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat atau daerah dapat menghambat pelaksanaan program dan proyek, sehingga anggaran tidak dapat digunakan dengan optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja anggaran dengan menggunakan metode *value for money* dapat disingkat sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan belanja target anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 dapat dikatakan ekonomis.
 - b. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran dan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021-2023 dapat dikatakan tidak efisien.
 - c. Berdasarkan rasio efektifitas bahwa realisasi anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021 dan tahun 2023 dapat dikatakan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat meningkatkan atau mempertahankan rasio ekonomi dengan melakukan realisasi pengeluaran

yang sesuai dengan kebutuhan kantor atau jumlah pengeluaran harus sesuai dengan penerimaan anggaran.

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh harus dapat mengelola keuangan dengan efisien seperti menggunakan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dikelola dengan tepat waktu.
3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat mengelolan realisasi anggaran pendapatan belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan dapat memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayuningtyas, Hertianti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Chudri, I. R., Irmawati, & Suri, C. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11(1), 10–16.
- Halim, Abdul (2020). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2020). *Analisis Kritis atas Lapoan Keuangan*. Jakarta : Raja Grasindo Persada
- Hasibuan, Malayu S.P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Husnawati, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 442-456.
- Irmawati., & Rinaldy, R. (2018). Analisa Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 93–99. <https://doi.org/10.37598/Jam.V8i1.540>
- Karina, L. A., & Ramadhani, W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2 (2), 71-82.
- Kasmir. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khaira, F., Umar, Z., Gadeng, T., & Yola, C. (2022). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020*. 12(2).
- Mahbengi, Syahri. (2019). Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1 (1), 1-13
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.

- Mahsun, M. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2020). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika ADITAMA
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Munandar, Agus. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5 (3), 1-14
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan *Laporan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Tidak Langsung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Langsung
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Daerah
- Prawironegoro, Darsono. (2020). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahman, Winia. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 1-17.
- Rasyidi, Ali. (2021). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya*, 1 (1), 1-12.
- Robbins SP, dan Judge. (2019). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rudianto. (2019). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, S. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2020). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta.
- Susanti, E., & Murnita, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Tahun Anggaran 2013-2015 Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 62–69. <https://doi.org/10.37598/Jam.V8i1.538>
- Susilo, Y Sri (2020) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo, A. H. (2020). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.
- Syamsidar, & Jawiyah. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Banda Aceh Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 62–69.
- Undang- Undang No.11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wandasari, D., & Daulay, A. N. (2023). Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1 (4), 68-96.
- Wibowo. (2020). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulianda, F., Hasibuan, A. N., & Damisa, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Projesh*, 1 (2), 315-334.

Zenita, Raisya. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, 1 (1), 1-10.

Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,286,724,500.00	852,370,000.00	66,24	856,915,000.00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	9,184,500.00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	1,119,140,000.00	708,170,000.00	63,28	856,915,000.00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	158,400,000.00	144,200,000.00	91,04	-
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	400,000,000.00	-	-	-
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	400,000,000.00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160,758,695,050.00	127,967,241,098.10	79,60	187,358,102,719.00
5.1.02.01.	Belanja Barang	111,006,778,577.00	85,575,347,963.00	77,09	97,004,778,773.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	111,006,778,577.00	85,575,347,963.00	77,09	97,004,778,773.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	28,028,603,597.00	25,707,631,408.00	91,72	72,816,224,341.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	23,229,531,547.00	21,254,261,282.00	91,50	67,753,263,941.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	243,000,000.00	240,355,170.00	98,91	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	3,000,000.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23,594,000.00	23,550,000.00	99,81	27,900,000.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,842,229,000.00	2,669,947,000.00	93,94	2,485,729,900.00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	435,249,050.00	432,838,525.00	99,45	1,863,995,500.00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	910,000,000.00	910,000,000.00	100,00	503,785,000.00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	120,000,000.00	85,565,000.00	71,30	71,450,000.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	225,000,000.00	91,114,431.00	40,50	107,100,000.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5,803,510,101.00	5,108,179,691.10	88,02	3,156,363,330.00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	400,674,972.00	399,378,000.00	99,68	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,629,491,129.00	3,943,195,520.00	85,18	1,661,333,833.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,144,000.00	282,785,700.00	99,52	1,251,631,747.00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,000,000.00	45,000,000.00	90,00	-
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	439,200,000.00	437,820,471.10	99,69	243,397,750.00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	14,794,802,775.00	11,454,790,036.00	77,42	14,380,736,275.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,257,156,950.00	11,454,790,036.00	93,45	14,380,736,275.00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2,537,645,825.00	-	-	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,000,000.00	121,292,000.00	97,03	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,000,000.00	121,292,000.00	97,03	-
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1,000,000,000.00	-	-	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1,000,000,000.00	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	886,394,324.00
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	676,287,824.00
5.1.05.02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	676,287,824.00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	210,106,500.00

Dalam Rupiah

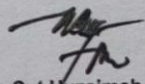
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	210,106,500.00
5.2.	BELANJA MODAL	8,343,783,698.00	7,192,464,038.37	86,20	5,395,577,054.37
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	138,827,760.00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	138,827,760.00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	-	-	-	138,827,760.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,650,904,095.00	1,824,415,234.90	68,82	4,212,453,812.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	167,500,000.00	24,900,000.00	14,87	32,805,000.00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	8,000,000.00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	167,500,000.00	24,900,000.00	14,87	24,805,000.00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	553,069,000.00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	551,920,000.00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	1,149,000.00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	3,234,012.00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-	3,234,012.00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	824,500,000.00	804,614,071.00	97,59	513,551,000.00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	824,500,000.00	804,614,071.00	97,59	513,551,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	200,444,860.00	181,657,000.00	90,63	905,825,200.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	66,444,860.00	65,352,000.00	98,36	59,712,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40,000,000.00	22,990,000.00	57,48	565,728,700.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94,000,000.00	93,315,000.00	99,27	280,384,500.00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	89,158,500.00	82,557,400.00	92,60	330,478,500.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	89,158,500.00	82,557,400.00	92,60	330,478,500.00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	60,027,000.00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	60,027,000.00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	769,300,735.00	730,686,763.90	94,98	1,813,464,100.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	544,894,335.00	518,605,800.90	95,18	1,481,358,100.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	224,406,400.00	212,080,963.00	94,51	332,106,000.00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,743,879,603.00	4,420,210,194.56	93,18	1,044,295,482.37
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4,146,199,603.00	3,886,684,639.57	93,74	1,044,295,482.37
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,146,199,603.00	3,886,684,639.57	93,74	1,044,295,482.37
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	597,680,000.00	533,525,554.99	89,27	-
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	597,680,000.00	533,525,554.99	89,27	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	849,000,000.00	848,398,608.91	99,93	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	849,000,000.00	848,398,608.91	99,93	-
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	849,000,000.00	848,398,608.91	99,93	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	99,440,000.00	99,44	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100,000,000.00	99,440,000.00	99,44	-

Permendagri 13

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	100,000,000.00	99,440,000.00	99,44	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(251,446,365,029.00)	(207,541,235,615.75)	82,54	(269,158,703,373.96)

Banda Aceh, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aceh


Ir. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217 199203 2 003

Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 3.27.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	993,000,000.00	609,599,170.50	61,39	1,019,289,288.22
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	993,000,000.00	609,599,170.50	61,39	1,019,289,288.22
4.1.02.	Retribusi Daerah	293,000,000.00	453,098,120.00	154,64	308,759,380.00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	293,000,000.00	453,098,120.00	154,64	308,759,380.00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	115,000,000.00	243,878,120.00	212,07	220,259,380.00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	28,000,000.00	40,050,000.00	143,04	24,050,000.00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150,000,000.00	169,170,000.00	112,78	64,450,000.00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	700,000,000.00	156,501,050.50	22,36	710,529,908.22
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	56,900,282.00	-	27,159,684.00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	56,900,282.00	-	27,159,684.00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	700,000,000.00	99,600,768.50	14,23	683,370,224.22
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	700,000,000.00	99,600,768.50	14,23	683,370,224.22
5.	BELANJA DAERAH	314,507,337,825.00	304,247,232,168.49	96,74	208,560,524,903.97
5.1.	BELANJA OPERASI	302,129,468,460.00	292,308,057,091.36	96,75	201,368,060,865.60
5.1.01.	Belanja Pegawai	73,940,409,585.00	72,259,648,883.00	97,73	73,400,819,767.50
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	41,589,616,921.00	41,118,183,726.00	98,87	42,963,636,675.50
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	31,411,777,211.00	31,322,708,948.00	99,72	32,623,864,242.50
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3,020,249,820.00	2,897,881,737.00	95,95	3,031,723,597.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	500,674,020.00	447,785,000.00	89,44	461,570,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,221,784,000.00	1,217,304,000.00	99,63	1,257,960,000.00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,072,988,598.00	1,072,920,000.00	99,99	1,158,665,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1,811,126,040.00	1,754,302,080.00	96,86	1,848,810,180.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	140,027,152.00	99,504,231.00	71,06	105,276,629.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,061,000.00	402,737.00	37,96	438,357.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2,088,063,880.00	2,047,846,563.00	98,07	2,207,079,489.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	88,932,000.00	64,382,028.00	72,39	67,062,083.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	232,933,200.00	193,146,402.00	82,92	201,187,098.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31,182,862,168.00	30,265,565,157.00	97,06	29,584,813,092.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5,769,065,004.00	5,079,478,775.00	88,05	5,359,761,500.00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	404,400,000.00	392,000,000.00	96,93	414,000,000.00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1,103,400,000.00	1,089,420,000.00	98,73	1,144,320,000.00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	23,905,997,164.00	23,704,666,382.00	99,16	22,666,731,592.00

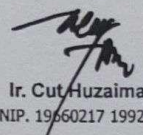
Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	967,930,496.00	875,900,000.00	90,49	852,370,000.00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif	8,850,496.00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-
5.1.01.03.08.	Belanja Honorarium	793,480,000.00	710,300,000.00	89,52	708,170,000.00
5.1.01.99.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	165,600,000.00	165,600,000.00	100,00	144,200,000.00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	200,000,000.00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Pegawai BLUD	200,000,000.00	-	-	-
5.1.02.01.	Belanja Barang dan Jasa	228,189,058,875.00	220,048,408,208.36	96,43	127,967,241,098.10
5.1.02.01.01.	Belanja Barang	178,643,125,559.00	172,691,150,823.00	96,67	85,575,347,963.00
5.1.02.01.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	178,640,875,559.00	172,688,900,823.00	96,67	85,575,347,963.00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2,250,000.00	2,250,000.00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	29,780,902,053.00	28,686,898,412.00	96,33	25,707,631,408.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	25,053,284,768.00	24,114,496,602.00	96,25	21,254,261,282.00
5.1.02.02.02.	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	207,000,000.00	200,613,375.00	96,91	240,355,170.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	119,050,000.00	107,450,150.00	90,26	23,550,000.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,741,973,000.00	3,654,424,000.00	97,66	2,669,947,000.00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	342,594,285.00	342,594,285.00	100,00	432,838,525.00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150,000,000.00	150,000,000.00	100,00	910,000,000.00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	85,565,000.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	167,000,000.00	117,320,000.00	70,25	91,114,431.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5,752,088,157.00	5,581,520,515.36	97,03	5,108,179,691.10
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	399,378,000.00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,823,451,793.00	4,656,505,176.00	96,54	3,943,195,520.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	903,636,364.00	900,167,989.36	99,62	282,785,700.00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25,000,000.00	24,847,350.00	99,39	45,000,000.00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	437,820,471.10
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	13,487,943,106.00	12,963,957,458.00	96,12	11,454,790,036.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,487,943,106.00	12,963,957,458.00	96,12	11,454,790,036.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,000,000.00	124,881,000.00	99,90	121,292,000.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,000,000.00	124,881,000.00	99,90	121,292,000.00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	400,000,000.00	-	-	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	400,000,000.00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	12,377,869,365.00	11,939,175,077.13	96,46	7,192,464,038.37
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,757,939,827.00	2,603,652,590.00	94,41	1,824,415,234.90
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	24,900,000.00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	24,900,000.00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	116,000,000.00	115,000,000.00	99,14	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	116,000,000.00	115,000,000.00	99,14	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25,153,124.00	24,309,000.00	96,64	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6

Banda Aceh, 12 April 2023
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aceh


Ir. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217 199203 2 003

Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,481,338,000.00	1,480,597,500.00	99,95	875,900,000.00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	1,308,538,000.00	1,307,797,500.00	99,94	710,300,000.00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	172,800,000.00	172,800,000.00	100,00	165,600,000.00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116,663,593,002.00	111,649,976,154.14	95,70	220,048,408,208.36
5.1.02.01.	Belanja Barang	79,222,641,930.00	78,101,988,691.00	98,59	172,691,150,823.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	79,222,641,930.00	78,101,988,691.00	98,59	172,688,900,823.00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	2,250,000.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	19,719,582,796.00	19,258,934,735.00	97,66	28,686,898,412.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	17,204,653,696.00	17,021,476,110.00	98,94	24,114,496,602.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57,780,000.00	54,770,625.00	94,79	200,613,375.00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	22,200,000.00	22,200,000.00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	302,771,200.00	293,133,000.00	96,82	107,450,150.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,091,338,000.00	1,826,948,000.00	87,36	3,654,424,000.00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10,089,900.00	9,657,000.00	95,71	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	342,594,285.00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	150,000,000.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30,750,000.00	30,750,000.00	100,00	117,320,000.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4,126,078,509.00	4,100,162,570.00	99,37	5,581,520,515.36
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,364,834,857.00	3,339,046,668.00	99,23	4,656,505,176.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679,674,652.00	679,546,902.00	99,98	900,167,989.36
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,569,000.00	81,569,000.00	100,00	24,847,350.00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	11,163,631,517.00	10,053,264,095.00	90,05	12,963,957,458.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11,163,631,517.00	10,053,264,095.00	90,05	12,963,957,458.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131,658,250.00	130,358,250.00	99,01	124,881,000.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131,658,250.00	130,358,250.00	99,01	124,881,000.00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,300,000,000.00	5,267,813.14	0,23	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,300,000,000.00	5,267,813.14	0,23	-
5.2.	BELANJA MODAL	25,395,404,634.00	14,865,051,241.50	58,53	11,939,175,077.13
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,808,018,748.00	5,388,531,410.00	54,94	2,603,652,590.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	181,000,000.00	179,248,350.00	99,03	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	181,000,000.00	179,248,350.00	99,03	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	115,000,000.00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	115,000,000.00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	72,312,024.00	64,709,120.00	89,49	24,309,000.00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	11,322,000.00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	72,312,024.00	64,709,120.00	89,49	12,987,000.00
			2,102,030,000.00	23,44	80,444,000.00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	6,286,650,898.00	2,102,030,000.00	33,44	80,444,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	806,034,500.00	780,513,540.00	96,83	1,145,224,490.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	57,000,000.00	56,541,560.00	99,20	187,190,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	731,184,500.00	706,121,980.00	96,57	919,684,490.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17,850,000.00	17,850,000.00	100,00	38,350,000.00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	269,019,850.00	258,685,400.00	96,16	339,704,500.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	269,019,850.00	258,685,400.00	96,16	333,804,500.00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	5,900,000.00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,161,751,476.00	1,012,280,000.00	87,13	-
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1,161,751,476.00	1,012,280,000.00	87,13	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1,031,250,000.00	991,065,000.00	96,10	872,930,000.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	984,400,000.00	944,215,000.00	95,92	741,053,000.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	46,850,000.00	46,850,000.00	100,00	131,877,000.00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	26,040,600.00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	26,040,600.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,393,042,458.00	9,176,586,081.50	97,70	7,937,168,037.13
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	9,393,042,458.00	9,176,586,081.50	97,70	7,937,168,037.13
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8,878,542,458.00	8,664,210,915.50	97,59	7,937,168,037.13
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	514,500,000.00	512,375,166.00	99,59	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	224,979,750.00	224,933,750.00	99,98	448,354,450.00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	214,133,750.00	214,133,750.00	100,00	448,354,450.00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	214,133,750.00	214,133,750.00	100,00	-
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	-	-	-	448,354,450.00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	10,846,000.00	10,800,000.00	99,58	-
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	10,846,000.00	10,800,000.00	99,58	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,969,363,678.00	75,000,000.00	1,26	950,000,000.00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75,000,000.00	75,000,000.00	100,00	950,000,000.00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75,000,000.00	75,000,000.00	100,00	950,000,000.00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5,894,363,678.00	-	-	-
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5,894,363,678.00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(211,413,062,859.00)	(195,613,815,205.65)	92,53	(303,637,632,997.99)

Banda Aceh, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
AcehIr. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217 199203 2 003

Permendagri 13